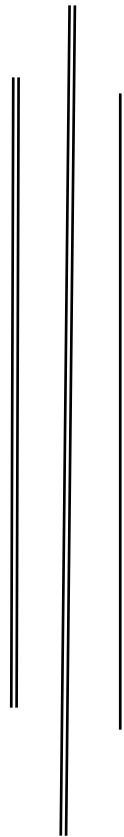


**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA
TAHUN 2023**



**JL. MULIA RAJA NO.24 KECAMATAN BALIGE
BALIGE**



SALINAN

BUPATI TOBA

**PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah;

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

Bab V Penutup

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Inspektorat Daerah

d. Dinas-Dinas:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Pertanian;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan:

1. Kecamatan Ajibata;
2. Kecamatan Balige;
3. Kecamatan Bonatua Lunasi;
4. Kecamatan Borbor;
5. Kecamatan Habinsaran;
6. Kecamatan Laguboti;
7. Kecamatan Lumban Julu;
8. Kecamatan Parmaksian;
9. Kecamatan Porsea;
10. Kecamatan Siantar Narumonda;
11. Kecamatan Sigumpar;
12. Kecamatan Silaen;
13. Kecamatan Tampahan;
14. Kecamatan Uluan;
15. Kecamatan Nassau;
16. Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal **15 JULI** 2022

BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal **15 JULI** 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022 NOMOR **25**

Salinan sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH.
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
NIP. 19750804 200502 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
4.1. Program dan Kegiatan	22
4.2. Pendanaan Indikatif	26
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Tipe B. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4).

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ialah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”**. Berdasarkan Visi Kabupaten Toba tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Infrastruktur yang Bagus dan Merata.
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
5. Pariwisata Berkat dan Meriah
6. Membangun Iman yang terpelihara
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 di atas, penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba terkait dengan misi ke dua yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal dan penanaman modal terkait dengan misi ke tujuh yaitu Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

Dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Toba guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandung arti bahwa Pemerintah Kabupaten Toba akan memanfaatkan segala yang ada dimiliki baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menggerakkan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini dapat mewujudkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.

Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Nasional;
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12)
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samoisr Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arahan, landasan yang kuat dan jelas dan sebagai alat kendali dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah untuk menciptakan Sinkronisasi, Sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah secara tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

Berisikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja Program dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan Program dan Kegiatan, Pendanaan Indikatif.

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- Gambaran Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Untuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.796.806.244,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.452.861.008,- yaitu untuk membiayai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Adapun target kinerja yang direncanakan dalam renstra maupun renja tahun 2021 dapat dikatakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba telah mencapai target untuk kegiatan yang tetap dianggarkan. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi ditargetkan 60 orang, realisasi 60 orang, Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ditargetkan 12 bulan, Dinas Tenaga Kerja telah merealisasikan Jumlah penduduk usia angkatan kerja yang aktif bekerja 101.754 orang (88,09%), Tingkat partisipasi angkatan kerja 80,32 % (88,75), Tingkat pengangguran terbuka 1,76% (107,37), Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 145 orang (145%) dan Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan 2 kasus Besar kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 3 kasus (150%).

Untuk pembangunan di bidang penanaman modal pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.234.826.785,- dan terealisasi sebesar Rp.2.797.556.521,- yaitu untuk membiayai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Adapun target kinerja yang direncanakan dalam renstra maupun renja tahun 2021 dapat dikatakan DMPPTSP Kabupaten Toba telah mencapai target untuk kegiatan yang tetap dianggarkan. DMPPTSP mengeluarkan atau penerbitan izin 148 IMB, 90 Surat Izin Usaha Perdagangan, 25 Izin Usaha Mikro kecil, 192 Nomor Induk Berusaha, 5 Izin Usaha jasa Konstruksi Nasional, 303 Izin pelayanan Kesehatan, 26 Izin Pelayanan Pendidikan, 6 Izin Trayek, 1 Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3, 33 Izin Pemasangan Reklame, 4 Izin Usaha Industri, 5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 195 Izin Lokasi, 3 Tanda Daftar Gudang, 1 Rekomendasi Tata Ruang.

- Gambaran Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 (tahun berjalan)

Untuk pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.592.048.146,- (Lima milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.488.778.095,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan sembilan puluh lima rupiah),- yaitu untuk membiayai Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 direncanakan akan membawa gambaran hasil sebagai berikut :

1. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.
2. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota.
3. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan).
4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).
5. Persentase penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP.
6. Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan.
7. Jumlah aplikasi yang terintegrasi.
8. Penunjang Kinerja Perangkat Daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel T.C. 29 berikut ini :

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	persen	75	235,000,000			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	02	2	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen	3	235,000,000			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	persen	5,53	4,963,101,500			1.38	790,220,300	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	03	2	01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kegiatan	16	4,833,101,500			3	790,220,300	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	03	2	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	lembaga	34	130,000,000			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	persen	100	512,303,750			70	50,000,000	23	0	33%	0%	23	0	23%	0%
2	07	04	2	01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Lowongan kerja yang tersedia di Kabupaten/kota	Perusahaan	18	150,000,000			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%

2	07	04	2	03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Pasar Kerja	bulan	72	209,303,750			12	30,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	04	2	04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	orang	20	40,000,000			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	04	2	05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Izin IMTA	perusahaan	25	113,000,000			5	20,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	persen	47	748,009,610			24	122,205,610	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beropersai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	persen	100	40,000,000			100	122,205,610	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	07	05	2	02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	persen	100	708,009,610			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	persen	5	817,164,750			1	259,993,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%

2	18	02	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Mengenai Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Dokumen	5	339,296,750			0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	02	2	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya daerah berpotensi	daerah potensi	6	477,868,000			1	259,993,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	289	283,800,000			1	70,950,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	03	2	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investasi	Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pamearaan	4	283,800,000			1	70,950,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	100	477,424,304			100	89,522,750	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan	dokumen	8114	477,424,304			1345	89,522,750	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan	Badan Usaha	126	658,448,690			16	107,752,158	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	05	2	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan	Badan Usaha	35	658,448,690			16	107,752,158	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah aplikasi yang tertangani	aplikasi	4	284,895,500			1	76,200,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%

2	18	06	2	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database yang terintegrasi	database	4	284,895,500			1	76,200,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	27,911,092,963			100	5,580,751,828	4	488,778,095	4%	9%	4	488,778,095	4%	2%
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	253,105,103			100	47,220,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	20,419,217,029			100	4,066,580,296	25	488,778,095	0%	0%	25	488,778,095	25%	2%
2	18	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	persen	100	287,625,000			100	80,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	persen	100	3,938,898,244			100	765,955,068	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	persen	100	115,980,000			100	50,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	persen	100	1,575,546,467			100	306,822,240	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
2	18	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	persen	100	1,320,721,120			100	264,174,224	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
JUMLAH									36,891,241,067				7,147,595,646		488,778,095				488,778,095	3%	0.2%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Untuk mengatasi pengangguran antara lain :

- a. Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) dioptimalkan
- b. Perusahaan di Kabupaten Toba dalam perekrutan tenaga kerja harus kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba khususnya bidang pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi yaitu menginformasikan lowongan pekerjaan dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
- c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri akan terlaksana dengan baik.

Dalam bidang ini juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Institusional dan Pelatihan Non Institusional. Kegiatan Pelatihan Institusional yaitu pelatihan menjahit, salon, tata boga, montir sepeda motor, komputer adalah salah satu upaya untuk menanggulangi naiknya angka pengangguran.

Karena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Toba dengan keterampilan yang didapat akan dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan membuat suatu usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pelatihan ini dilaksanakan didalam Balai Latihan Kerja dengan jumlah jam pembelajaran minimal 240 jam pelajaran / kegiatan.

Kegiatan Pelatihan Non Institusional yaitu pelatihan menjahit, salon, sovenir dan tataboga adalah salah satu upaya untuk menanggulangi naiknya angka pengangguran, karena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Toba dengan keterampilan yang didapat akan dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan membuat suatu usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pelatihan ini dilaksanakan diluar Balai Latihan Kerja dengan jumlah jam pembelajaran maxsimal 240 jam pelajaran / kegiatan.

2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kondisi umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada masa kini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Minimnya Persentase jumlah perusahaan di Kabupaten perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja;
- b. Minimnya tenaga ahli bidang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan perselisihan;
- c. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toba belum seluruhnya memiliki LKS Bipartit.
- d. Akses terhadap data dan informasi ketenagakerjaan belum optimal.

3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dimana perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, DPMPTSPK diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha terkait sistem pengurusan perizinan berusaha ini karena masih tergolong baru.

4. Bidang Penanaman Modal

Berhubung dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka DPMPTSPK tahun depan diharapkan bisa membuat sebuah peta potensi, peraturan daerah tentang rencana umum penanaman modal dan juga giat dalam melakukan promosi potensi wisata kepada calon investor dan bisa membuat proposal ready to offer kepada para pengusaha untuk meningkatkan realisasi investasi yang pada tahun 2022 berada di sekitar 1.975 Triliun rupiah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sesuai format tabel T-C.30 sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Toba.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman.

Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intensif memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi.

Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian secara optimal di Kabupaten Toba.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “ Analisis SWOT ” (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT ini secara efektif sangat

membantu dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi.

Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan (sthrengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Sthrengths)

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik
2. Tersedianya tenaga atau personel yang memadai
3. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

b. Kelemahan (Weakness)

1. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Masih kurang profesionalnya personel organisasi
3. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik

2. Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor – faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi.

Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang” (opportunities) dan ”tantangan” (Threats). Adapun faktor eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan politis dari Pemkab Toba dan DPRD.
2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program.
3. Dukungan lintas sektoral serta peranan aktif dunia usaha.
4. Danau Toba yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.
6. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan.

b. Tantangan (Threats)

1. Tingginya angka pengangguran.
2. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.
3. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur yang benar terhadap pelayanan perijinan.
5. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan.
6. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pengusaha mikro kecil menengah.
7. Makin berkembangnya dunia usaha.

c. Issue Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut di atas, maka dapat ditemukan issue – issue strategis sebagai berikut :

1. Perusahaan yang ada di Kabupaten Toba tidak menginformasikan lowongan pekerjaan pada perusahaannya ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
2. Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia tidak mengikuti sistem yang benar, masih banyak sekolah-sekolah merekrut Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri tanpa sepengetahuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
3. Rendahnya kesadaran perusahaan dan karyawan akan pentingnya PP dan PKB sehingga ketika muncul permasalahan Perselisihan Industrial kedua pihak akan mengalami kesulitan memahami hak dan kewajiban masing-masing.
4. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Balai Latihan Kerja dan manfaatnya bagi masyarakat.
5. Masih adanya investor yang terlambat atau bahkan tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga diperlukan adanya sosialisasi penting LKPM bagi investor, perlu juga dibuat aturan yang mengatur tentang pelaporan LKPM, perlu ada sistem reward dan punishment untuk para pengusaha yang membuat LKPM.

6. Belum semua layanan dilakukan secara elektronik sehingga rekapitulasi data tidak bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Tindak lanjutnya adalah dengan memasukkan semua layanan baik ke aplikasi umum maupun aplikasi milik daerah.
7. Sarana dan prasarana belum cukup memadai di lingkungan DPMPTSPK, perlu dilakukan inventarisasi atau pendataan ulang serta pengadaan sarana dan prasarana.
8. Perlunya DPMPTSPK mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik. Diperlukan banyak inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital saat ini.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu cara mereview terhadap rancangan awal RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan. Berikut adalah Hasil Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sesuai dengan tabel.T-C.31. sebagai berikut :

Tabel T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja			75.00%	0.00%	0.00	75%	75.00%	0.00%			
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.			1.04%	1.38%	2.42%	3.45%	1.04%	0.00%			
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.			50%	70%	80%	90%	50%	23.00%			
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)			18%	24%	30%	35%		0.00%			
5	persentase peningkatan investasi			0%	1%	1%	1%	0%	0.00%			
6	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			282	1	0	2	106	0.00			
7	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP			90%	100%	100%	100%	90%	0.00%			
8	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan			0	16	20	25	0	0.00			
9	Jumlah aplikasi yang terintegrasi			0	1	0	1	0	0.00			
10	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	25.00%			

Tabel T-C. 31

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1,182,671,300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1,182,671,300	
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Toba	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2.42%	975,220,300	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2.42%	975,220,300	
1	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Kabupaten Toba			950,220,300	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>		<i>Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	3 kegiatan	950,220,300	
1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Toba	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	500,220,300	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	500,220,300	
1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Toba	Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 lembaga	450,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 lembaga	450,000,000	
2	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Kabupaten Toba			25,000,000	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>		<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta</i>	7 Lembaga	25,000,000	
1.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Toba	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	7 lembaga	25,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	7 lembaga	25,000,000	

II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Toba	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	80%	51,000,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	80%	51,000,000	
1	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>Kabupaten Toba</i>			<i>30,000,000</i>	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>		<i>Penempatan Tenaga Kerja</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>30,000,000</i>	
1.1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Toba	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	100 orang	30,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	100 orang	30,000,000	
2	<i>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kabupaten Toba</i>			<i>21,000,000</i>	<i>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Izin IMTA</i>	<i>5 perusahaan</i>	<i>21,000,000</i>	
2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Retribusi PAD	5 perusahaan	21,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi PAD	5 perusahaan	21,000,000	
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Toba	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30%	156,451,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30%	156,451,000	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba			10,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0.22%	10,000,000	
1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kabupaten Toba	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 perusahaan	10,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 perusahaan	10,000,000	

2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba			146,451,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Kerja Bersama	100%	146,451,000	
2.1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	43,901,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	43,901,000	
2.2.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Toba	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan SP	12,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan SP	12,000,000	
2.3.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	90,550,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	90,550,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,020,424,881	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,020,424,881	
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	5,524,794,365	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	5,524,794,365	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Toba			49,581,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	49,581,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Toba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokumen	22,575,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokumen	22,575,000	

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Toba	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	27,006,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	27,006,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Toba			4,072,231,107	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,072,231,107	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Toba	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 orang/bulan	4,072,231,107	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 orang/bulan	4,072,231,107	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Toba			50,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Toba	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	50,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Toba			781,985,794	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	781,985,794	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Toba	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket	30,998,845	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	30,998,845	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Toba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	126,645,255	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	126,645,255	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Toba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Paket	43,990,144	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	43,990,144	
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Toba	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	17 Paket	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	40,000,000	

4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Toba	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6 Dokumen	12,498,250	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	12,498,250	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Toba	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300 laporan	527,853,300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	527,853,300	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Toba			306,822,240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	306,822,240	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Toba	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	44,998,240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	44,998,240	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Toba	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	261,824,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	261,824,000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Toba			264,174,224	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	264,174,224	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Toba	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	183,443,728	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	183,443,728	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Toba	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	20,998,207	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	20,998,207	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Toba	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	48,598,289	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	48,598,289	

6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Toba	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	11,134,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	11,134,000	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				292,493,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan investasi	1%	292,493,000	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba			239,993,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Perda Mengenai Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	2 dokumen	239,993,000	
1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Toba	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	209,993,000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	209,993,000	
1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Toba	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	30,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	30,000,000	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba			52,500,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Banyaknya daerah berpotensi	1 daerah potensi	52,500,000	
2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	52,500,000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	52,500,000	
VI	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				89,997,750	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	100%	89,997,750	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Toba			89,997,750	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	1350 dokumen	89,997,750	

1.1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Toba	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	80,022,750	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	80,022,750	
1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Toba	Jumlah orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	10 orang	9,975,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	10 orang	9,975,000	
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				113,139,766	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan	20 Badan Usaha	113,139,766	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Toba			113,139,766	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan	20 Badan Usaha	113,139,766	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Toba	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	12 Kegiatan Usaha	21,945,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	12 Kegiatan Usaha	21,945,000	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Toba	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	14 Pelaku Usaha	57,699,766	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	14 Pelaku Usaha	57,699,766	
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Toba	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	33,495,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	33,495,000	
	TOTAL KESELURUHAN				7,203,096,181	TOTAL KESELURUHAN				7,203,096,181	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan umum yakni meningkatnya kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dapat menampung usulan dari Kecamatan jika ada diusulkan pada saat pelaksanaan forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Untuk tahun 2023 usulan program dan kegiatan dari Kecamatan untuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba dapat disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Toba

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1). Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha;
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba adalah untuk menciptakan atau merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan.
- b. Meningkatnya penyelesaian hubungan industrial perusahaan dan tenaga kerja.
- c. Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA.
- d. Meningkatnya Kemudahan Berusaha.

3.3. Program dan Kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dalam mengentaskan kemiskinan antara lain :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat sebagai persiapan untuk bersaing didunia kompetensi dalam menghadapi era globalisasi.
 2. Menginformasikan lowongan pekerjaan dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
 3. Meningkatnya perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja.
 4. Meningkatkan program, manfaat dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 5. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan non perizinan
 6. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
- b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.
 Dengan keterbatasan dana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba berupaya maksimal untuk meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan.

Program yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Toba.

- c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023 terhadap penyusunan rumusan program dan kegiatan Tahun 2023 ada ketidaksesuaian yaitu perubahan target, hal ini disebabkan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun telah dilakukan penyesuaian dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan Tahun 2023.

- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel TC.33 yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PENYERAPAN MAJU TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1,182,671,300				1,192,171,300
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen		2.42	975,220,300				980,220,300
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	kegiatan		3	950,220,300				950,220,300
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n	orang	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60	500,220,300	Dana Transper Umum/Da na Alokasi Umum		2.42 persen	500,220,300

2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	lembaga	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	450,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		2.42 persen	450,000,000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	Lembaga		7	25,000,000				30,000,000
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	lembaga	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7	25,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		2.42 persen	30,000,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen		80	51,000,000				55,500,000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Bulan		12	30,000,000				31,500,000
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	orang	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	30,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		80 persen	31,500,000
2	07	04	2.05		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Izin IMTA	perusahaan		5	21,000,000				24,000,000
2	07	04	2.05	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Retribusi PAD	perusahaan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	21,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		80 persen	24,000,000

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen		30	156,451,000				156,451,000
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	persen		0.22	10,000,000				10,000,000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	perusahaan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	10,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		30 persen	10,000,000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Kerja Bersama	persen		100	146,451,000				146,451,000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	43,901,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		30 persen	43,901,000

2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Asosiasi dan SP	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	12,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		30 persen	12,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	lembaga	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	90,550,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		30 persen	90,550,000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6,020,424,881				5,875,840,158
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persen		100	5,524,794,365				5,558,545,766
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen		100	49,581,000				49,581,000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	dokumen	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	22,575,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	22,575,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7	27,006,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	27,006,000

2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		100	4,072,231,107				4,089,032,508
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39	4,072,231,107	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	4,089,032,508
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100	50,000,000				50,000,000
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	50,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	50,000,000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	781,985,794				796,985,794
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	30,998,845	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	30,998,845
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	126,645,255	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	141,645,255
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	43,990,144	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	43,990,144
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	40,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	40,000,000

2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	dokumen	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	12,498,250	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	12,498,250
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	527,853,300	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	527,853,300
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	306,822,240				308,822,240
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	44,998,240	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	46,998,240
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	261,824,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	261,824,000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		100	264,174,224				264,124,224
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13	183,443,728	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	183,443,728
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	20,998,207	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	20,948,207

2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	48,598,289	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	48,598,289
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	11,134,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	11,134,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investasi	Persen		1	292,493,000				84,000,000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Mengenai Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	dokumen		2	239,993,000				31,500,000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	209,993,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		1 persen	-
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	30,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		1 persen	31,500,000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya daerah berpotensi	daerah potensi		1	52,500,000				52,500,000
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	52,500,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		1 persen	52,500,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen		100	89,997,750	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum			94,497,638

2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	dokumen		1350	89,997,750				94,497,638
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	kegiatan usaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300	80,022,750	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	84,023,888
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	orang	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	9,975,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		100 persen	10,473,750
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan	Badan Usaha		20	113,139,766				138,796,754
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan	Badan Usaha		20	113,139,766				138,796,754
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Usaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	21,945,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		20 Badan Usaha	28,042,250

2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14	57,699,766	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		20 Badan Usaha	65,584,754
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14	33,495,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum		20 Badan Usaha	45,169,750
TOTAL										7,203,096,181	TOTAL			7,068,011,458

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja adalah yang memuat program, kegiatan dan indikator kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Toba menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023 ada 7 (tujuh) program dan 16 (enam belas) kegiatan serta Sub Kegiatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) yaitu terdiri dari :

I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
 - 1.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - 2.1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

II. Program Penempatan Tenaga Kerja.

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
2. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

III. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan.
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 6.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

V. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - 1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

Program Pelayanan Penanaman Modal.

VI.

- 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
 - 1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

VII. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

4.2. Pendanaan Indikatif

Penjelasan tabulasi rencana program dan kegiatan memuat uraian program dan kegiatan serta pendanaan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33A sebagai berikut :

TABEL T-C. 33A

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Sumber Dana	OPD Penanggungjawab	Jenis Kegiatan
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan						
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										1,182,671,300	1,192,171,300			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2.42%					975,220,300	980,220,300			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3 kegiatan			950,220,300	950,220,300			
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	500,220,300	500,220,300	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 lembaga	450,000,000	450,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										25,000,000	30,000,000			

2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	7 lembaga	25,000,000	30,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	80%					51,000,000	55,500,000			
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan			30,000,000	31,500,000			
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	100 orang	30,000,000	31,500,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Izin IMTA	5 perusahaan			21,000,000	24,000,000			
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Retribusi PAD	5 perusahaan	21,000,000	24,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30%					156,451,000	156,451,000			

2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota						Persentase Perusahaan yang telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0.22%			10,000,000	10,000,000			
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 perusahaan	10,000,000	10,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Toba			Persentase Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Kerja Bersama	100%			146,451,000	146,451,000			
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdaya saing		Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	43,901,000	43,901,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan SP	12,000,000	12,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SDM Yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	90,550,000	90,550,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										6,020,424,881	5,875,840,158			

2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%					5,524,794,365	5,558,545,766			
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%			49,581,000	49,581,000			
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningk atan tata kelola pemerint ahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyaraka t	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokume n	22,575,000	22,575,000	Dana Transper Umum/D ana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningk atan tata kelola pemerint ahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyaraka t	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	27,006,000	27,006,000	Dana Transper Umum/D ana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			4,072,231,107	4,089,032,508			
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningk atan tata kelola pemerint ahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyaraka t	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 orang/bu lan	4,072,231,107	4,089,032,508	Dana Transper Umum/D ana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			50,000,000	50,000,000			
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningk atan tata kelola pemerint ahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyaraka t	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 orang	50,000,000	50,000,000	Dana Transper Umum/D ana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			781,985,794	796,985,794			

2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	30,998,845	30,998,845	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	126,645,255	141,645,255	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	43,990,144	43,990,144	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	40,000,000	40,000,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	12,498,250	12,498,250	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	527,853,300	527,853,300	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	306,822,240	308,822,240			
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	44,998,240	46,998,240	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru

2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	261,824,000	261,824,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			264,174,224	264,124,224			
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	183,443,728	183,443,728	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	20,998,207	20,948,207	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	48,598,289	48,598,289	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	11,134,000	11,134,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Persentase Peningkatan investasi	1%					292,493,000	84,000,000			
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Perda Mengenai Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	2 dokumen			239,993,000	31,500,000			

2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	209,993,000	-	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	30,000,000	31,500,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						Banyaknya daerah berpotensi	1 daerah potensi			52,500,000	52,500,000			
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	52,500,000	52,500,000	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	100%					89,997,750	94,497,638	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	1350 dokumen			89,997,750	94,497,638			
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	80,022,750	84,023,888	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	10 orang	9,975,000	10,473,750	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan	20 Badan Usaha					113,139,766	138,796,754			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Badan Usaha yang dikendalikan	20 Badan Usaha			113,139,766	138,796,754			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	12 Kegiatan Usaha	21,945,000	28,042,250	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	14 Pelaku Usaha	57,699,766	65,584,754	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	33,495,000	45,169,750	Dana Transper Umum/Dana Alokasi Umum	DPMPTSPTK	Baru
TOTAL															7,203,096,181	7,068,011,458			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						146,451,000			146,451,000			
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Bendampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemertaa Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PEB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Jumlah Perkara Penasulahan yang Terealisasi	Terealisainya penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	3 Perkara	100 %	43,901,000	43,901,000			
2	07	05	2.02	03	Pengkondisian Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Perusahaan, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pemertaa Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PEB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Terealisainya penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	1 Asosiasi dan SP	100 %	12,000,000	12,000,000			
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pemertaa Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PEB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terealisainya penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	1 Lembaga	100 %	90,550,000	90,550,000			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6,020,424,881			5,875,840,158			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,524,794,365			5,558,545,766			
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49,581,000			49,581,000			
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 persen	22,575,000	22,575,000			
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	100 persen	27,006,000	27,006,000			
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,072,231,107			4,089,032,508			
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	39 Orang/bulan	100 %	4,072,231,107	4,089,032,508			
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000			50,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode				Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						146,451,000				146,451,000			
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Terselesainya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	3 Perkara	100 %	43,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30 Persen	43,901,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non-Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Terselesainya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	1 Asosiasi dan SP	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30 Persen	12,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terselesainya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten Toba	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	1 Lembaga	100 %	90,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30 Persen	90,550,000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6,020,424,881				5,875,840,158		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,524,794,985				5,558,345,768		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49,581,000				49,581,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 persen	22,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	22,575,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	100 persen	27,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	27,006,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,072,231,107				4,089,032,508		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	39 Orang/bulan	100 %	4,072,231,107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	4,089,032,508
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000				50,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.15.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakirisan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	50,000,000	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							781,983,794					796,363,794	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 %	30,998,645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	30,998,645	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 %	126,645,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	141,645,255	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 %	43,990,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	43,990,144	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	40,000,000	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 %	12,498,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	12,498,250	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Laporan	100 %	527,853,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	527,853,300	
2	18	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							306,822,240					306,822,240	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 %	46,998,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	46,998,240	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0009 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode					Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselesaikan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 %	261,804,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	261,804,000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								264,174,224					264,174,224
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Unit	100 %	183,443,728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	183,443,728
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	100 %	20,948,207	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	20,948,207
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 %	48,598,289	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	48,598,289
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 %	11,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	11,134,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL								292,493,000				84,000,000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								219,993,000				31,500,000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan dan rekomendasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Persen	1 Dokumen	2 dokumen	209,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi	1 Persen	0
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Laporan dan rekomendasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Persen	1 Kegiatan Usaha	2 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi	1 Persen	31,500,000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								52,500,000				52,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pemertaaan peningkatan investasi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penerbitan 1(kat) dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Persen	1 Dokumen	1 Daerah Potensi	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemertaaan peningkatan investasi	1 Persen	52,500,000	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										89,997,750			94,497,638		
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										89,997,750			94,497,638	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	pemertaaan Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Bersuaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan perizinan bersuaha serta perizinan dan non perizinan bersuaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	300 Kegiatan Usaha	1350 dokumen	80,022,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pemertaaan Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	100 persen	84,023,888	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelaaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	pemertaaan Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan bersuaha serta perizinan dan non perizinan bersuaha	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Orang	1350 dokumen	9,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pemertaaan Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	100 persen	10,473,750	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										113,139,786			138,796,754		
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										113,139,786			138,796,754	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peserta memahami tentang Perizinan Bersuaha Tertegregi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pma/PMDN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Badan Usaha	12 Kegiatan Usaha	20 Bidang Usaha	21,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	20 Badan Usaha	28,042,250	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peserta memahami tentang Perizinan Bersuaha Tertegregi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pma/PMDN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Badan Usaha	14 Pelaku Usaha	20 Bidang Usaha	57,699,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	20 Badan Usaha	65,584,754	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Peserta memahami tentang Perizinan Bersuaha Tertegregi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pma/PMDN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Badan Usaha	14 Kegiatan Usaha	20 Bidang Usaha	33,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	20 Badan Usaha	45,169,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
								TOTAL							

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 2022.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,**



**Drs. REGUEL HASADAAN
PEMBINA TK.I
NIP. 19700626 199009 1 001**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 2022.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,

Drs. REGUEL HASADAAN
PEMBINA TK.I
NIP. 19700626 199009 1 001